Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Volume 26, Issue 02, Juli 2026, 715-722
Webite: https://ji.unbari.ac.id, E-Mail: jiubj.unbari@gmail.com
e-ISSN: 2549-4236 (Online), p-ISSN: 1411-8939 (Print), DOI: 10.33087/jiubj.v26i2.6570

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Keistimewaan terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rizki Lutfiana Saputri, Sodik Dwi Purnomo*, Bagus Adhitya
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Wjayakusuma Purwokerto
*Correspondence: sodikdwipurnomo@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2013–2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan metode analisis regresi data panel. Secara parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan (DAIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi kemandirian fiskal daerah melalui PAD serta perluasan reorientasi dan efisiensi pengalokasian dana transfer pusat maupun keistimewaan agar lebih berorientasi pada program penanggulangan kemiskinan secara langsung.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan, Kemiskinan.

ABSTRACT.
This study aims to analyze the effect of Local Own Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Privilege Funds (DAIS) on poverty rates across regencies/cities in the Special Region of Yogyakarta (DIY) from 2013 to 2024. A descriptive quantitative approach utilizing panel data regression analysis was employed. Partially, Local Own Revenue (PAD) has a negative and significant effect on poverty rates. Conversely, General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Privilege Funds (DAIS) do not exert a significant effect on poverty rates. The implications of this study emphasize the necessity of optimizing regional fiscal independence through PAD, alongside reorienting and enhancing the allocation efficiency of central transfer and privilege funds to align them directly with targeted poverty alleviation programs.

Keywords: *Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Privilege Fund, Poverty*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan (Kumenaung *et al.*, 2019). Kemiskinan menjadi fokus utama perhatian pemerintah karena dianggap sebagai salah satu faktor penghambat kemajuan dan perkembangan suatu negara. Jika ditinjau dari perspektif kebijakan umum, kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua aspek. Pertama, aspek primer yang mencakup keterbatasan keterampilan dan pengetahuan, ketiadaan aset, serta lemahnya organisasi sosial dan politik. Kedua, aspek sekunder yang meliputi keterbatasan jaringan sosial, minimnya akses terhadap informasi, dan terbatasnya sumber keuangan (Rini & Sugiharti, 2017). Menurut Bank Dunia, penyebab kemiskinan di suatu negara tidak lain karena kurangnya pendapatan dan asset negara (*Lack Of Income and Assets*) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Aswin & Yasa, 2021).

kemiskinan merupakan persoalan yang cukup serius maka perlu adanya perhatian serius juga bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan program dan kebijakan yang tepat dari pemerintah, sebab semakin tinggi jumlah serta persentase penduduk miskin di suatu wilayah, semakin besar pula beban yang ditanggung dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan dalam menurunkan angka kemiskinan (Kumenaung *et al.*, 2019). Keberadaan program pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental dan menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai efektifitas pelaksanaan berbagai program pembangunan suatu daerah (Pratama & Utama, 2019).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya namun masih memiliki banyak jumlah penduduk miskin salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah unggulan di Indonesia yang memiliki status istimewa berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012. DIY dikenal dengan potensi ekonomi berbasis pariwisata, pendidikan,

dan kebudayaan, namun masih menghadapi tantangan kemiskinan yang kompleks. Pada tahun 2024, angka kemiskinan DIY mencapai 10,83% (BPS DIY, 2024), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (8,57%). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), DIY seringkali mencatat tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa 2013-2024 (Persen)

No	Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	DIY	15,03	14,55	13,16	13,10	12,36	11,81	11,44	12,80	11,91	11,49	11,04	10,83
2	Jawa Tengah	14,44	13,58	13,32	13,19	12,23	11,19	10,58	11,84	11,25	10,98	10,77	10,47
3	Jawa Timur	12,73	12,28	12,28	11,85	11,20	10,85	10,20	11,46	10,59	10,49	10,35	9,79
4	Jawa Barat	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	7,25	6,82	8,43	7,97	7,98	7,62	7,46
5	Banten	5,89	5,51	5,75	5,36	5,59	5,25	4,94	6,63	6,50	6,24	6,17	5,84
6	DKI Jakarta	3,72	4,09	3,61	3,75	3,78	3,55	3,42	4,69	4,67	4,61	4,44	4,30
	Rata-rata	10,24	9,87	9,62	9,34	8,83	8,32	7,90	9,31	8,82	8,63	8,40	8,12

Sumber : Data Badan Pusat Statistik, 2024

Melihat kondisi kemiskinan yang terus meningkat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan keterlibatan aktif dari pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, salah satunya melalui penerapan otonomi daerah. Lahirnya otonomi daerah tentu diikuti juga dengan munculnya desentralisasi fiskal yang mana pemerintah daerah menerima wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan untuk mengatur permasalahan fiskalnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah sejalan dengan kemunculan desentralisasi fiskal sebagai pengatur terkait ketersediaan fasilitas publik yang layak dan memadai (Rany, 2021). Dengan demikian, pemanfaatan potensi daerah dapat dioptimalkan sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lebih banyak lapangan kerja. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya instrumen yang berperan dalam menjamin pelaksanaannya, yaitu Anggaran Pendapatan dan Dana Transfer dari pemerintah pusat yang dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat (Nurhalimah, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan yang adil dan merata antar daerah, serta pemberdayaan sumber daya alam dan manusia. Dalam pelaksanaan otonomi tersebut, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah guna memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Inti dari kebijakan perimbangan keuangan adalah pembagian dana antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, serta kondisi masing-masing wilayah. Dana ini penting untuk menjamin tersedianya standar pelayanan publik yang merata di seluruh Indonesia. Ketimpangan kapasitas fiskal dan ekonomi antar daerah menjadi alasan utama adanya dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Nany *et al*., 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak, retribusi, serta pemanfaatan sumber daya alam setempat, memberikan fleksibilitas tambahan bagi keuangan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki sumber dana yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran bagi belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana prasarana. Hal ini secara signifikan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik yang dapat dinikmati masyarakat (Dewi & Suarjana, 2018).

Dana yang berasal dari PAD dapat diprioritaskan untuk program sosial, bantuan langsung, dan pembangunan ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian, PAD yang optimal mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan melalui layanan publik yang lebih baik dan program penanggulangan kemiskinan yang terstruktur (Ramadani, 2019). Berdasarkan hasil penelitian Noermanisa (2023) PAD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di DIY. Pendapatan Asli Daerah hanya dapat menutupi paling banyak sekitar 20 persen dari total belanja pemerintah daerah. Meskipun kontribusinya terhadap belanja daerah relatif terbatas, PAD tetap menjadi komponen penting dalam pembiayaan pembangunan dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk menerapkan

kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. (Fitriyanti & Handayani, 2020).

Guna mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat juga menyalurkan Dana Perimbangan kepada setiap daerah, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah serta memastikan terpenuhinya standar pelayanan publik (Yuliani & Suhana, 2022). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Variabel ini menggambarkan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu sumber keuangan tambahan bagi daerah dalam rangka memperkuat kapasitas fiskalnya. Besarnya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan dimasing-masing daerah, di mana daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi akan menerima transfer DAU yang lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah (Rizal *et al*., 2024). Melalui DAU, pemerintah daerah, termasuk Provinsi DI Yogyakarta, memperoleh dukungan anggaran untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian Rany (2021) DAU berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang mengindikasikan bahwa DAU menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang belum merata.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan instrumen fiskal yang ditujukan untuk mendanai kegiatan tertentu di daerah sesuai dengan prioritas nasional, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DAK berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. DAK Fisik difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, seperti sekolah, puskesmas, jalan, serta irigasi, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas serta kualitas hidup masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu, DAK Nonfisik, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), berfungsi memperluas akses layanan dasar yang lebih merata bagi kelompok miskin (Rizal *et al*., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Kutanegara (2023) menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DIY, yang mengindikasikan bahwa semakin besar alokasi DAK, semakin rendah angka kemiskinan di daerah tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan DAK yang tepat sasaran mampu memperkuat program penanggulangan kemiskinan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial antarwilayah. Namun, efektivitas DAK sangat dipengaruhi oleh tata kelola anggaran di tingkat daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang dibiayai DAK. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas institusi daerah dalam pengelolaan DAK menjadi faktor kunci agar dana tersebut dapat benar-benar menyentuh masyarakat miskin secara langsung dan berkelanjutan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan alokasi tambahan transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Keistimewaan, yang mulai diterima sejak tahun 2013. Pengalokasian dana ini didasarkan pada pengakuan terhadap status keistimewaan yang dimiliki oleh provinsi tersebut, yang membedakannya dari daerah-daerah lain di Indonesia. Keistimewaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas peran strategis dan kontribusi signifikan D.I. Yogyakarta dalam menjaga, memperkokoh, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Dana Keistimewaan, pemerintah pusat mendorong upaya pelestarian nilai-nilai budaya, tata pemerintahan, serta penguatan identitas daerah yang sejalan dengan prinsip persatuan dan kesatuan nasional (Suharto & Aini, 2024).

Selain itu, masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kemampuan untuk berintegrasi secara harmonis dalam masyarakat Indonesia yang beragam, yang mencakup perbedaan adat istiadat, agama, serta bahasa, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Dana Keistimewaan sendiri merupakan salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah, yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan kewenangan keistimewaan di D.I. Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu fokus utama dari penggunaan Dana Keistimewaan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai. Kesejahteraan dapat diukur melalui penurunan kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi kesejahteraan penduduk (Aryanto, 2019).

Dana Keistimewaan diberikan kepada masyarakat baik dalam bentuk bantuan langsung maupun tidak langsung, yang dikenal dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan. Bantuan ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah pengembangan dan pelestarian budaya melalui pembentukan *Rintisan Kalurahan Budaya*. Program ini memberikan kewenangan bagi kalurahan untuk menjaga dan melestarikan budaya dengan melibatkan pelaku budaya, kelompok budaya, serta masyarakat lokal,

sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada penurunan kemiskinan. Selain itu, BKK Dana Keistimewaan juga disalurkan secara langsung, misalnya melalui penyewaan tanah kas desa yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama warga miskin, untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka (Suharto & Aini, 2024).

Secara lebih luas, BKK Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertujuan mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi), pengembangan pendidikan (sarana sekolah, beasiswa, pelatihan guru, peningkatan kualitas pendidikan), peningkatan layanan kesehatan (fasilitas medis, perawatan, program kesehatan masyarakat, dan akses layanan kesehatan), pelestarian budaya dan tradisi (pemugaran candi, penguatan seni tradisional, dan pengembangan wisata budaya), serta pengembangan sektor ekonomi lokal (pendanaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan program pengentasan kemiskinan). Oleh karena itu, alokasi Dana Keistimewaan terus meningkat setiap tahunnya dengan harapan mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi DIY (Suharto & Aini, 2024). Berdasarkan hasil penelitian dari Hasanah (2025) dan Pangestu (2022) menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di DIY.

Berbagai penelitian mengenai kemiskinan telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti oleh Noermanisa (2023), Triwulandari *et al*., (2023), Kumenaung *et al.,* (2019), Rany (2021), Fajri *et al*., (2020), Yintayani *et al*., (2019), Gumelar (2021) yang menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya peningkatan PAD dan Dana Perimbangan akan menurunkan tingkat kemiskinan dan begitu juga sebaliknya. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi mendorong pembangunan fasilitas dan infrastruktur untuk kepentingan publik, sehingga meningkatkan kesejahteraan, layanan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan di daerah. Berbeda dengan penelitian Hijrasil (2024), Sinaga *et al.,* (2023), Agatha & Uliansyah (2021), Triyulianto *et al*., (2024), Prabowo *et al*.,(2023) yang menunjukkan bahwa hasil PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang artinya peningkatan PAD dapat secara langsung merangsang peningkatan tingkat kemiskinan.

Sedangkan penelitian Amami & Asmara (2022), Lindrianti, (2022), Suharto & Aini (2024), Fathiyyah (2021) menunjukkan bahwa PAD dan Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Namun Demikian, Provinsi D.I Yogayakarta memiliki Dana keistimewaan yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang didukung oleh penelitian Pangestu (2022) dan Hasanah (2025) dengan karakteristik keuangan daerah yang unik dan status keistimewaan yang dimiliki, terdapat kebutuhan akan penelitian yang lebih spesifik dan mendalam untuk menjelaskan bagaimana keempat instrumen fiskal tersebut berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, peneliti berusaha untuk menganalisis dan menguji apakah terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Keistimewaan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa penelitian tersebut lebih menekankan pada pengaruh parsial antara satu atau dua variabel fiskal terhadap kemiskinan di tingkat nasional atau regional, namun masih sangat terbatas kajian yang mengkaji secara simultan pengaruh keempat variabel tersebut dalam konteks daerah istimewa seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber daya fiskal daerah ini memainkan peran penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, sedangkan DAU dan DAK merupakan bentuk transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan fiskal daerah. Sementara Dana Keistimewaan yang unik bagi DIY bertujuan mendukung pengelolaan keistimewaan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Meski alokasi anggaran dari berbagai sumber ini telah meningkat, dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan di DIY belum sepenuhnya optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis secara empiris dan statistik pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan terhadap tingkat kemiskinan. Populasi penelitian ini berfokus pada wilayah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan mengumpulkan data sekunder kurun waktu 2013 hingga 2024 yang diperoleh dari instansi resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY dan website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Selain itu, teknik dokumentasi dan studi pustaka juga diterapkan untuk memperkuat referensi dan landasan teoritis.

Dalam penelitian ini, variabel dibedakan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan (Y) yang diukur dari proporsi penduduk miskin dalam satuan persentase (%). Sementara itu, variabel independen terdiri dari empat komponen transfer dan pendapatan daerah yang diukur dalam satuan Rupiah (Rp), yaitu PAD DAU, DAK, dan Dana Keistimewaan. Masing-masing variabel independen mencerminkan sumber penerimaan dan alokasi dana

fiskal daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel untuk memberikan estimasi yang efisien dengan *degree of freedom* yang lebih besar serta meminimalkan bias akibat *omitted variables*. Pengolahan data diawali dengan pemilihan model estimasi terbaik melalui uji spesifikasi model, meliputi Uji Chow (menentukan antara *Common Effect* vs *Fixed Effect*), Uji Hausman (*Fixed Effect* vs *Random Effect*), dan Uji *Lagrange Multiplier* jika diperlukan. Adapaun persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$Yit = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DAIS_{it} + \varepsilon$

dengan: Yit : Kemiskinan; PADit : Pendapatan Asli Daerah; DAUit : Dana Alokasi Umum; DAKit : Dana Alokasi Khusus; DAISit : Dana Keistimewaan; β0 : Konstanta; β1, β2, β3, β4 : Koefisien Regresi; ε : Standar Error; i : *cross section*; dan t : Time series

Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, guna menghasilkan model estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

HASIL

Pemilihan model regresi data panel terbaik antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) dilakukan melalui serangkaian pengujian berbasis EViews 13 untuk memastikan estimasi bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga FEM terpilih dibanding CEM. Pengujian dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM, di mana nilai probabilitas *Cross-section random* menunjukkan hasil 0,000 (< 0,05). Hasil tersebut memperkuat keputusan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model paling tepat untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini.

Pengujian asumsi klasik dilakukan pada model terpilih (FEM) untuk menjamin validitas dan keandalan hasil estimasi. Uji normalitas dievaluasi mengacu pada nilai probabilitas Jarque-Bera. Hasil analisis menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,0932 (> 0,05) dengan statistik 4,7448. Hal ini menandakan bahwa data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Pengujian dilanjutkan dengan uji multikolinearitas untuk mengidentifikasi keberadaan korelasi yang tinggi antarvariabel bebas berdasarkan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF). Hasil perhitungan menunjukkan nilai *Centered VIF* untuk PAD (1,0829), DAU (1,4546), DAK (1,6255), dan Dana Keistimewaan (1,3680) secara keseluruhan berada di bawah ambang batas 10 (VIF < 10). Dengan demikian, dipastikan tidak terdapat masalah multikolinearitas antarvariabel independen dalam model.

Terakhir, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel independen. Hasil estimasi menunjukkan nilai signifikansi untuk PAD (0,0825), DAU (0,5557), DAK (0,6637), dan Dana Keistimewaan (0,3656), yang kesemuanya berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas dan memenuhi syarat asumsi klasik.

Tabel 2
Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel	Nilai Koefisien	t-hitung	Sig.	Pengaruh
Konstanta (C)	44,25278			
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	-7,598228	-4,289637	0,0001	Signifikan
Dana Alokasi Umum (X_2)	-2,306052	-0,304543	0,7620	Tidak Signifikan
Dana Alokasi Khusus (X_3)	-0,591161	-1,528280	0,1326	Tidak Signifikan
Dana Keistimewaan (X_4)	-0,704899	-1,495416	0,1410	Tidak Signifikan

Sumber: data olahan

Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2024

Berdasarkan hasil analisis data dari tahun 2013 hingga 2024, terlihat adanya tren yang berlawanan antara pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman secara konsisten mencatatkan nilai PAD tertinggi di wilayah tersebut, yang mencapai puncaknya pada angka Rp1.184.120.000 di tahun 2024, sementara wilayah dengan PAD terendah seringkali diduduki oleh Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Pada sisi lain, data tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa wilayah dengan PAD yang lebih rendah, seperti Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul, justru memiliki persentase penduduk miskin yang paling tinggi di provinsi tersebut, meskipun angka kemiskinan secara umum menunjukkan tren penurunan bertahap selama dua belas tahun pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah yang tercermin dalam PAD memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan suatu wilayah dalam menekan angka kemiskinan di tingkat kabupaten dan kota.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013–2024, yang berarti setiap peningkatan nilai PAD sudah tentu

diikuti oleh penurunan persentase kemiskinan secara nyata. Temuan tersebut membuktikan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Apabila kemiskinan tidak di ringankan, maka sebuah negara akan terjebak di dalam lingkaran setan kemiskinan (Widyastuti & Nusantara, 2022). Kemiskinan juga dipandang sebagai permasalahan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang bersifat terpadu, menyeluruh, serta berkelanjutan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan (Amami & Asmara, 2022; Fathiyyah, 2021; Lindrianti, 2024). Adanya penelitian terbaru pada 2026 ini mengindikasikan bahwa pada akhirnya PAD mampu untuk menurunkan atau memengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah. Pemerintah masih perlu berupaya mempertahankan untuk menurunkan persentase kemiskinan di daerahnya salah satunya melalui meningkatkan nilai pendapatannya.

Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2024

Analisis terhadap perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2013 hingga 2024 menunjukkan adanya pola alokasi fiskal yang terstruktur guna mendukung desentralisasi. Berdasarkan data penelitian, Kabupaten Sleman secara konsisten menjadi penerima DAU tertinggi selama dua belas tahun berturut-turut, dengan nilai yang meningkat dari Rp891,59 juta pada tahun 2013 hingga mencapai Rp1.019,20 juta pada tahun 2024. Sebaliknya, Kota Yogyakarta tercatat sebagai wilayah dengan alokasi DAU terendah sepanjang periode tersebut, dimulai dari Rp594,98 juta pada tahun 2013 dan mencapai Rp672,64 juta pada tahun 2024. Penyaluran dana ini beriringan dengan tren penurunan persentase kemiskinan di seluruh wilayah DIY, di mana Kota Yogyakarta konsisten memiliki tingkat kemiskinan terendah, yakni menyentuh angka 6,26% pada tahun 2024, sementara kabupaten lainnya terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui dukungan dana transfer tersebut.

Hasil pengujian) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini memberikan perspektif pada teori Lingkaran Setan Kemiskinan menurut Robert Chambers yang mengemukakan bahwa kemiskinan bukanlah sekadar kekurangan materi semata, melainkan merupakan suatu kondisi multidimensional yang mencakup berbagai aspek ketidakberuntungan yang saling berkaitan satu sama lain. Kondisi ini menciptakan suatu lingkaran kesulitan yang menjerat individu atau kelompok, sehingga mereka sulit untuk melepaskan diri dari jeratan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah dana alokasi umum bukan merupakan faktor utama yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan.

Temuan ini juga dapat dilihat melalui teori Desentralisasi Fiskal yang didasarkan pada asumsi bahwa pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan barang dan layanan publik (Utomo & Sumarsono, 2009). Adanya desentralisasi ini menciptakan persaingan antar daerah otonom, yang pada akhirnya mendorong perbaikan kualitas layanan publik karena masing-masing daerah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara optimal. Hasil penelitian ini mendukung temuan pada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemiskinan (Aini & Suharto, 2024; Lindrianti, 2024). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, belum memerlukan peningkatan pada Dana Alokasi Umum. Pada penelitian ini membuktikan bahwa strategi tersebut tidak akan memengaruhi angka persentase kemiskinan.

Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2024

Analisis terhadap data Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pola alokasi yang bersifat kompensatoris (mampu menyeimbangkan) untuk mendukung pembangunan di wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Gunung Kidul secara konsisten menjadi wilayah dengan penerimaan DAK tertinggi selama periode pengamatan, sementara Kota Yogyakarta menerima alokasi terendah pada tahun 2024. Tingginya alokasi DAK di wilayah kabupaten, khususnya di Gunung Kidul dan Kulon Progo, beriringan dengan persentase kemiskinan yang secara struktural memang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, di mana angka kemiskinan tertinggi pada akhir periode penelitian tercatat di Kabupaten Kulon Progo. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat melalui DAK berupaya memberikan dukungan finansial yang lebih besar pada daerah-daerah yang memiliki tantangan kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur lebih berat guna menciptakan pemerataan layanan publik di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013–2024, yang belum bisa mengonfirmasi bahwa penambahan alokasi dana khusus ini secara efektif mampu menurunkan angka penduduk miskin. Temuan ini memberikan bukti alternatif terhadap teori Lingkaran Setan Kemiskinan, di mana alokasi DAK

tidak berperan sebagai bentuk investasi modal untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar yang selama ini menjadi hambatan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk keluar dari jebakan kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga belum bisa dikatakan relevan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang dikembangkan oleh Wallace Oates, yang menyatakan bahwa efisiensi ekonomi akan tercapai ketika pemerintah pusat mentransfer dana spesifik kepada pemerintah daerah karena otoritas lokal memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai urusan daerah dan kebutuhan mendesak masyarakatnya. Dengan sifat DAK yang diarahkan pada kebutuhan tertentu, pemerintah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengalokasikan dana tersebut secara presisi untuk program-program yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu juga bertentangan hasil penelitian ini. Dimana temuan penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan (Fathiyyah, 2021; Lindrianti, 2024; Suharto & Aini, 2024). Hal ini dikarenakan alokasi DAK yang bersifat spesifik memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas masyarakat ekonomi lemah. Kesamaan temuan ini menegaskan bahwa intervensi fiskal melalui dana transfer khusus tetap menjadi instrumen yang efektif dalam memutus rantai kemiskinan, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang beragam seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan validasi kuat bahwa ketepatan sasaran dalam penggunaan DAK menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten dan kota.

Dana Keistimewaan terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2024

Analisis terhadap alokasi Dana Keistimewaan (DAIS) dan tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2013 hingga 2024 menunjukkan adanya distribusi anggaran yang dinamis guna mendukung kewenangan khusus daerah. Berdasarkan data penelitian, Kabupaten Gunung Kidul tercatat sebagai penerima alokasi tertinggi pada periode awal hingga tahun 2020, dengan nilai yang mencapai puncaknya pada tahun 2019. Namun, memasuki tahun 2021 hingga 2024, posisi penerima alokasi tertinggi beralih ke Kota Yogyakarta.

Sebaliknya, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul secara bergantian menempati posisi terendah dalam penerimaan dana ini di beberapa tahun tertentu, yang mencerminkan penyesuaian prioritas program keistimewaan terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah. Distribusi dana ini beriringan dengan tren penurunan angka kemiskinan di DIY, di mana alokasi dana yang signifikan di wilayah kabupaten diharapkan mampu memperkuat sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2024. Temuan ini membuktikan bahwa setiap peningkatan alokasi Dana Keistimewaan belum dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan persentase kemiskinan melalui pendanaan urusan kebudayaan, tata ruang, dan pertanahan yang terintegrasi dengan aspek pemberdayaan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Aini & Suharto (2024) mempertegas tidak adanya pengaruh dari Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap persentasi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dengan adanya hasil penelitian ini, data dari tahun 2013 hingga 2024 menunjukan bahwa DAIS belum mampu menurunkan angka persentase kemiskinan di daerah tersebut.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kurun waktu 2013–2024, mengindikasikan bahwa optimalisasi kemandirian fiskal daerah efektif dalam menekan angka penduduk miskin. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan (DAIS) terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan secara statistik. Tidak signifikannya dampak dana transfer tersebut didorong oleh penggunaan DAU yang mayoritas terserap untuk pembiayaan operasional rutin, fokus DAK pada alokasi infrastruktur fisik tertentu yang membutuhkan waktu transmisi lama untuk menyentuh akar kemiskinan, serta orientasi Dana Keistimewaan yang dominan pada sektor kebudayaan, tata ruang, kelembagaan, dan pertanahan tanpa korelasi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Implikasi dari temuan ini menuntut pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah yang inklusif guna menjamin alokasi belanja sosial yang lebih mandiri. Di sisi lain, diperlukan evaluasi mendalam serta reorientasi alokasi dana transfer pusat dan keistimewaan melalui sinkronisasi program berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan aspek budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Penajaman prioritas belanja DAU dan DAK pada urusan wajib pelayanan dasar, disertai penguatan sistem monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, menjadi solusi fundamental agar efisiensi belanja fiskal daerah dapat memberikan dampak langsung terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan struktural di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Amami, R., Asmara, K., 2022. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297

Aryanto, R., 2019. Analisis Faktor-Faktor Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017. *Jimfeb*, 2(2), 1–12.

BPS DIY. 2024. *Profil Kemiskinan di D.I. Yogyakarta September 2024*. BPS DIY. https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1610/profil-kemiskinan-di-d-i--yogyakarta-september-2024.html

Fathiyyah, S. N., 2021. Pengaruh PAD , DAU , DAK dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah*, 1, 1–20. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/7964/6779

Fitriyanti, N. I., Handayani, H. R., 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje

Gilang Pangestu, Y. A., 2022. Analysis Performance of Tax Effort and Privilege Funds Influencing Economy of Special Region of Yogyakarta in 2014-2019. *Jejak*, 15(1), 221–233. https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.38586

Konny Joula Ellen Rasu, Anderson G. Kumenaung, R. A. M. K., 2019. Kemiskinandi Kota Manado. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4), 12–25.

Lindrianti, N. F., 2024. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Alokasi Dana Dari Pusat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2015-2020. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 46–56. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djoe.32822

Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., Kusumaningsih, A. U., 2022. Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 22(3), 247–261. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8274

Noermanisa, T., 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta.

Nurhalimah, F. A., 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kota Surabaya. *Jurnal Ekobistek*, 10(2), 115–123. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.112

Nuryana Nurul Hasanah. 2025. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan An Analysis Of The Effect Of Yogyakarta's Privilege Fund. 25(1), 39–49.

Pratama, N. R. N. S., Utama, M. S., 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8[7], 651–680.

Rany, A. P., 2021. Pengaruh PAD , DAU , dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus 38 Kab / Kota Di Prov Jawa Timur Periode 2010-2019). Fakultas Ekonomi Bisnis.

Rini, A. S., Sugiharti, L. 2017. Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2). https://doi.org/10.20473/jiet.v1i2.3252

Suarjana, A. A. G. M., Dewi, N. I. K. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(2), 66–79. https://doi.org/10.31940/jbk.v14i2.1040 *(Dikutip dalam teks sebagai Dewi & Suarjana, 2018)*

Suharto, S., Aini, F. N., 2024. Analisis pengaruh dana keistimewaan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 24–32. https://doi.org/10.20885/jkek.vol3.iss1.art4

Triwulandari, B. B., Boedirochminarni, A., Firmansyah, M., 2023. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2013-2022. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 7(2), 175–187. https://doi.org/10.32847/jshp.v7i2.1747

Utomo, H., Sumarsono,. 2009. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(2), 1–10.

Widyastuti, A., Nusantara, A., 2022. Does Fiscal Decentralization Affect Poverty? An Empirical Study. *Economics Development Analysis Journal*, 11(3), 305–312. https://doi.org/10.15294/edaj.v11i3.56912

Yuliani, D., Suhana. 2022. Pengaruh Kepemimpinan dan Keadilan Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi (Studi pada Karyawan Perusahaan Manufaktur di Karawang). *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 61–78.